BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Data Informan

Peneliti telah melakukan wawancara langsung kepada 5 Kepala KUA dan 4 Penghulu KUA di Kota Banjarbaru yang meliputi Kepala dan Penghulu KUA Liang Anggang, Kepala dan Penghulu KUA Landasan Ulin, Kepala KUA Banjarbaru Utara, Kepala dan Penghulu KUA Banjarbaru Selatan, dan Kepala dan Penghulu KUA Cempaka. Berikut adalah uraian identitas 5 kepala dan 4 Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarbaru:

a. Kepala KUA Liang Anggang

Nama	: Fahrudin, S.Ag
Tempat Tanggal Lahir	: HDL. Babirik, 23 Juni 1966
Jabatan	: Kepala KUA
Alamat	: Komplek, Banawa Raya Jl. Madinah RT.46 RW.03

Menurut hasil wawancara dengan Kepala KUA Liang Anggang, Beliau menjelaskan bahwa bagi calon pengantin anak perempuan pertama, terdapat syarat tambahan dalam proses pendaftaran nikah di KUA. Syarat tersebut adalah pengumpulan buku nikah orang tua, yang mana akan dibandingkan dengan akta kelahiran anak. Perbandingan ini bertujuan untuk mengecek jarak

waktu antara tanggal akad nikah orang tua dan kelahiran anak, apakah lebih atau kurang dari enam bulan. Hal ini penting untuk menentukan apakah anak tersebut lahir dalam atau di luar pernikahan.

Beliau juga menyampaikan bahwa ada beberapa kasus di mana calon pengantin perempuan pertama tidak dapat mengumpulkan buku nikah orang tua, seperti ketika orang tuanya menikah secara sirri. Dalam situasi ini, beliau akan memanggil kedua orang tua untuk mendapatkan pernyataan dan kejujuran mengenai waktu pelaksanaan pernikahan mereka. Jika setelah diperiksa tidak ada rukun dan syarat pernikahan yang dilanggar, KUA akan melanjutkan proses dengan ayah sebagai wali nikah. Namun, jika terbukti bahwa jarak antara pelaksanaan nikah orang tua dan kelahiran anak kurang dari enam bulan, maka wali yang digunakan adalah wali hakim. Hal yang sama juga berlaku jika orang tua kehilangan buku nikah, beliau akan memanggil kedua orang tua untuk mendapatkan pernyataan tentang pernikahan keduanya.

Beliau melaksanakan pertemuan dan meminta pernyataan dari orang tua anak tersebut berdasarkan pengalaman pribadi yang menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang protes dan enggan melaksanakan proses ini, terutama terkait dengan masalah pembiayaan. Contohnya, ketika orang tua yang menikah secara

sirri direkomendasikan untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama, mereka harus mengeluarkan biaya dan waktu sehingga mereka enggan melakukannya. Selain itu, proses pembuatan duplikat buku nikah bagi yang kehilangan buku nikah juga yang bersangkutan merasa hal tersebut hanya memperumit mereka untuk mengurus ke KUA tempat pelaksanaan nikah sebelumnya. Oleh karena itu, beliau berupaya untuk mempermudah proses pernikahan bagi calon pengantin perempuan pertama, mengingat bahwa yang ingin menikah adalah anak tersebut, bukan orang tuanya.

Dalam penggunaan dasar hukum beliau mengatakan tidak ada, akan tetapi hal tersebut dilakukan untuk kehati-hatian sehingga pernyataan orang tua itu digunakan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menentukan wali nikah, karena pernikahan adalah ibadah yang dipertanggung jawabkan langsung kepada Allah Swt.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan mendapatkan langsung pernyataan dari Kepala KUA Liang Anggang kejadian yang terjadi waktu itu calon pengantin anak perempuan pertama mendaftar nikah kemudian ayahnya mengalami stroke sehingga tidak bisa datang untuk menjadi wali nikah sehingga beliau

⁴⁸ Fahrudin, Kepala Kantor Urusan Agama Liang Anggang, *Wawancara Pribadi*, Liang Anggang, 24 Februari 2025.

menyuruh anak tersebut menyampaikan kepada ayahnya untuk melakukan taukil wali bil kitabah.

Ternyata setelah itu beliau mencek buku nikah dan melihat ketidak sesuaian tanggal pernikahan orang tua dengan kelahiran anak tersebut, sehingga dianggil lah ibu dari anak tersebut untuk menanyakan dan meminta kejelasan, yang mana tanggal lahir anak dengan tanggal pernikahan orang tua hanya selisih 3 bulan kemudian ibu dari anak tersebut mengaku memang benar anak tersebut dikandung sebelum pernikahan, maka di batalkanlah taukil wali bil kitabah dan dijadikan wali nikah dengan wali hakim karena wali bagi anak diluar nikah tidak bisa digantikan dengan keluarga ayah.

Kemudian beliau juga mengatakan kepada ibu dari anak tersebut untuk tidak memberitahukan kepada anak tersebut tentang fakta kelahirannya dikarenakan hal tersebut hal sensitif takutnya anak tersebut stress karna terguncang jiwanya sehingga dibuatlah alasan untuk anak tersebut bahwa ayahnya stroke sehingga wali nikah digantikan oleh wali hakim.⁴⁹

b. Penghulu KUA Liang Anggang

Nama : Darma Kusuma

Tempat Tanggal Lahir : Cempaka, 03 Agustus 1983

⁴⁹ Fahrudin, Kepala Kantor Urusan Agama Liang Anggang, Wawancara Pribadi, 22 Mei 2024.

Jabatan : Penghulu KUA

Alamat : Cempaka RT. 11 RW. 03

Menurut hasil wawancara dengan Penghulu KUA Liang Anggang, Beliau menjelaskan bahwa dalam konteks calon pengantin anak perempuan pertama, terdapat syarat tambahan yang mengharuskan pengumpulan buku nikah orang tua sebagai alat pembanding dengan akta kelahiran anak. Dalam situasi di mana orang tua menikah secara sirri, penentuan wali nikah dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Apabila orang tua memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh penghulu tidak resmi, yang mencantumkan tanggal dan hari pelaksanaan pernikahan, maka surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti. Namun, jika surat tersebut tidak diberikan oleh penghulu tidak resmi tersebut, pernyataan langsung dari orang tua yang bersangkutan akan dijadikan sebagai dasar untuk penentuan wali nikah.

Beliau juga menyampaikan bahwa saat ini, jika terdapat kendala dalam pengumpulan buku nikah orang tua, informasi mengenai tanggal pernikahan orang tua dapat diperoleh dari kartu keluarga terbaru. Kartu keluarga tersebut kini mencantumkan tanggal pernikahan, sehingga memudahkan dalam menentukan jarak kelahiran anak dan penetapan wali nikah.

Dalam hal kehilangan buku nikah bisa menggunakan duplikat buku nikah, apabila dalam hal kehilangan buku nikah maka bisa mendapat surat keterangan dari kepolisian, dan dalam hal kerusakan buku nikah maka dapat meminta surat keterangan dari kelurahan, Surat keterangan tersebut kemudian dibawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat pelaksanaan pernikahan sebelumnya untuk mendapatkan buku nikah yang baru.

Beliau menjelaskan bahwa penetapan wali nikah melalui pernyataan orang tua bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam penunjukan wali. Kemudian dalam konteks dasar hukum pernikahan sirri, hukum positif Indonesia tidak ada mengenai penggunaan buku nikah dan pernyataan orang tua sebagai penentu wali nikah. Namun, hukum syariat tetap diterapkan, mengingat pentingnya jarak kelahiran dalam penentuan wali nikah. Selain itu, dasar hukum mengenai penerbitan duplikat buku nikah diatur dengan jelas dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024.⁵⁰

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2025, penulis menyaksikan langsung akad nikah pengantin anak perempuan pertama yang orang tuanya menikah sirri dengan wali nikah ayahnya sendiri, yang mana hal tersebut

⁵⁰ Darma Kusuma, Penghulu Kantor Urusan Agama Liang Anggang, Wawancara Pribadi, Liang Anggang, 26 Februari 2025.

dilakukan dengan adanya pernyataan langsung dari orang tua kepada pihak KUA bahwa anak tersebut dilahirkan setelah satu tahun masa pernikahan, sehingga diyakini bahwa anak tersebut bukanlah anak diluar nikah dan tidak menghalangi ayah sebagai wali nikah yang sah.

c. Kepala KUA Landasan Ulin

Nama : H. Rimy Herdian, S.Ag
Tempat Tanggal Lahir : Amuntai, 15 November 1976
Jabatan : Kepala KUA
Alamat : Jl. Sagitarius Banjarbaru Selatan,
Kelurahan Sungai Besar

Menurut hasil wawancara dengan Kepala KUA Landasan Ulin, Beliau menyatakan bahwa dalam Peraturan Menteri Agama Tahun 2024 dan peraturan terkait pernikahan, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan calon pengantin perempuan pertama untuk mengumpulkan buku nikah orang tua. Namun, pengumpulan buku nikah ini merupakan langkah kehati-hatian yang diambil oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menentukan wali nikah, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian jangka waktu antara kelahiran anak dan pelaksanaan pernikahan orang tua.

Dalam hal orang tua menikah sirri maka KUA akan meneliti apakah pernikahan tersebut sesuai dengan rukun dan

syarat pernikahan, apabila pernikahan tersebut sesuai maka KUA akan menoleransi hal tersebut dan menjadikan ayah sebagai wali nikah, karena buku nikah bukanlah hukum mutlak. Namun, jika pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat, KUA akan menjelaskan kepada pihak terkait bahwa ayah tidak dapat berfungsi sebagai wali nikah, dan sebagai alternatif, proses pernikahan akan dilanjutkan dengan menggunakan wali hakim.

Begitu pula dalam hal orang tua kehilangan buku nikah maka akan diteliti dimana orang tua tersebut melaksanakan akad nikah maka bisa dilihat dari akta nikah terkait tanggal pelaksanaan nikah yang bersangkutan, dan jika memungkinkan maka orang tua tersebut harus membuat duplikat buku nikah, apabila tidak memungkinkan seperti KUA tempat pelaksanaan nikah menempuh jarak yang jauh maka tidak dipaksakan.

KUA juga menyarankan bagi orang tua yang menikah sirri untuk melaksanakan isbat nikah ke pengadilan dan pembuatan duplikat buku nikah bagi orang tua yang kehilangan buku nikah, karena hal tersebut pasti akan diperlukan dikemudian hari dalam hal seperti pembagian ahli waris, pembuatan kartu keluarga, dan yang lainnya. Akan tetapi hal tersebut kembali yang bersangkutan KUA tidak memaksakan dan tetap melanjutkan pernikahan anak tersebut karena hal

tersebut hanya bentuk kehati-hatian KUA untuk menentukan wali nikah anak tersebut.

Kepala KUA Landasan Ulin juga mengatakan untuk dasar hukum dari dari buku nikah tersebut tidak ada dalam peraturan, akan tetapi memudahkan KUA dalam menentukan wali nikah, isbat nikah untuk pasangan yang menikah sirri itu hanya hal yang disarankan dan sepenuhnya diserahkan kepada yang bersangkutan perlu atau tidak, kemudian dalam hal duplikat buku nikah beliau mengatakan hal tersebut memang ada termuat dalam PMA No.30 Tahun 2024.⁵¹

d. Penghulu KUA Landasan Ulin

Nama : M. Sugiannoor, SHI
 Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 7 Juli 1986
 Jabatan : Penghulu KUA
 Alamat : Jl. Sapta Marga, Guntung Payung,
 Kota Banjarbaru

Menurut hasil wawancara dengan Penghulu KUA Landasan Ulin, beliau menjelaskan bahwa dalam administrasi pendaftaran nikah sesuai dengan standar nasional, tidak terdapat persyaratan mengenai pengumpulan buku nikah orang tua untuk calon pengantin perempuan pertama, kedua, dan seterusnya.

⁵¹ H. Rimy Herdian, Kepala Kantor Urusan Agama Landasan Ulin, Wawancara Pribadi, 24 Februari 2025.

Namun, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai cerita di masyarakat yang menunjukkan bahwa pernikahan orang tua tidak berlangsung secara normal contohnya seperti tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Dari situasi tersebut, diambil kebijakan untuk calon pengantin perempuan, khususnya anak perempuan pertama, untuk mengumpulkan buku nikah orang tuanya sebagai bukti sahnya pernikahan orang tua anak tersebut.

Terdapat beberapa kasus di mana calon pengantin perempuan pertama tidak dapat mengumpulkan buku nikah orang tuanya, seperti dalam situasi pernikahan sirri. Oleh karena itu, diambil tindakan untuk melakukan wawancara langsung dengan orang tua guna mendapatkan pernyataan mengenai sejarah pernikahan mereka. Selain wawancara, terdapat juga bukti otentik yang dapat digunakan, seperti akta kelahiran dan kartu keluarga, yang mencantumkan bahwa anak perempuan tersebut merupakan bagian dari keluarga ayah dan ibu yang bersangkutan.

Dalam kasus kehilangan buku nikah, disarankan agar yang bersangkutan segera mengajukan permohonan duplikat buku nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat orang tuanya menikah. Hal ini dikarenakan buku nikah tidak hanya diperlukan untuk keperluan penetapan wali nikah bagi anak

perempuan, tetapi juga akan dibutuhkan dalam berbagai kepentingan lainnya, seperti pembuatan paspor, pelaksanaan umrah, haji, dan urusan terkait ahli waris.

Beliau juga menyatakan bahwa dalam konteks isbat nikah bagi pasangan yang menikah secara sirri, proses tersebut hanya disarankan. Namun, di lapangan, seringkali hal ini tidak memungkinkan bagi pihak yang bersangkutan karena memerlukan waktu yang cukup lama untuk dilaksanakan, sehingga cukup dengan wawancara.

Alasan dan dasar hukum beliau menyatakan dalam fikih munakahat cukup dengan pernyataan yang bersangkutan dan dengan bantuan fakta-fakta dari akta kelahiran dan kartu keluarga cukup dengan hal tersebut untuk menentukan wali nikah. Selain itu, terkait dengan penerbitan duplikat buku nikah, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024.⁵²

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 24 Februari 2025 memang benar di KUA Landasan Ulin menerapkan persyaratan administrasi yaitu pengumpulan buku nikah orang tua dalam bentuk fotocopy, dimana saat calon pengantin datang untuk mendaftar nikah dengan mengumpulkan

⁵² M. Sugiannoor, SHI, Penghulu Kantor Urusan Agama Landasan Ulin, Wawancara Pribadi, 24 Februari 2025.

berkas pendaftaran maka dicek satu persatu oleh staff KUA kemudian ditanyakan apakah calon pengantin perempuan adalah anak pertama, dan ternyata benar calon pengantin perempuan tersebut adalah anak pertama maka mengumpulkanlah buku nikah orang tuanya.

e. Kepala KUA Banjarbaru Utara

Nama : Drs. Gazali Rahman, M.M
Tempat Tanggal Lahir : Nagara, 24 September 1967
Jabatan : Kepala KUA
Alamat : Jalan Pandawa Komplek Taman
Trikora Asri Gang Ar-Rahman Kota
Banjarbaru

Menurut hasil wawancara dengan Kepala KUA Banjarbaru Utara, Beliau menjelaskan bahwa terdapat persyaratan dalam pendaftaran nikah anak perempuan, di mana salah satu syaratnya adalah melampirkan buku nikah orang tua yang digunakan untuk menentukan wali nikah yang bersangkutan. Dalam konteks pernikahan sirri, penting untuk memeriksa keabsahan pernikahan orang tua berdasarkan rukun dan syarat yang berlaku; jika memenuhi ketentuan tersebut, maka wali nikah tetap dapat dipegang oleh ayah. Namun, terkait dengan anak perempuan pertama, tidak dapat dilampirkan buku nikah orang tua karena pernikahan sirri belum pernah beliau

dapati terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Utara.

Beliau juga menyatakan bahwa lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Utara yang berada di kawasan perkotaan berkontribusi pada tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang relatif tinggi. Hal ini mengakibatkan jarang terjadinya kendala dalam hal dokumen persyaratan nikah.

Dalam konteks kehilangan buku nikah, beliau menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Utara akan memberikan bantuan dalam pembuatan duplikat buku nikah, dengan syarat bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Banjarbaru Utara. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024 mengenai duplikat buku nikah.⁵³

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada 26 Februari 2025 dengan menanyakan langsung dengan Kepala dan Staff KUA memang benar di KUA Banjarbaru Utara menggunakan buku nikah orang tua sebagai penentu wali nikah anak perempuan pertama, dan memang benar kejadian anak

⁵³ Gazali Rahman, M.M, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara, Wawancara Pribadi, 26 Februari 2025.

perempuan pertama yang tidak bisa mengumpulkan buku nikah orang tua itu tidak pernah terjadi di wilayah KUA Banjarbaru Utara, dimana mereka selalu dapat mengumpulkan buku nikah orang tuanya.

f. Kepala KUA Banjarbaru Selatan

Nama : Masran Musjiono, S.Ag
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Juni 1971
Jabatan : Kepala KUA
Alamat : Jl. Guntung Manggis, Kecamatan
Landasan Ulin

Menurut hasil wawancara dengan Kepala KUA Banjarbaru Selatan, beliau mengatakan dalam penentuan jarak kelahiran, terdapat pandangan yang diangkat dari sejarah Islam, khususnya pada masa Utsmani, di mana terdapat laporan mengenai kelahiran anak yang terjadi sebelum usia kehamilan genap enam bulan. Kemudian Ibnu Abbas menyatakan bahwa masa kehamilan hingga menyusui berlangsung selama 30 bulan, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Ahqaf ayat 15. Selain itu, dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, dinyatakan bahwa masa menyusui adalah selama dua tahun, yang setara dengan 24 bulan. Dengan demikian, jika masa kehamilan dan menyusui dijumlahkan menjadi 30 bulan, dan dikurangi dengan masa

menyusui selama 24 bulan, maka lahirlah periode enam bulan yang menjadi acuan dalam penentuan jarak kelahiran.

Dalam konteks hukum pernikahan dan status anak, undang-undang menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang sah diakui sebagai anak yang sah. Oleh karena itu, jika pasangan menikah hari ini dan anak lahir keesokan harinya, anak tersebut tetap dianggap sah. Pertanyaan yang muncul adalah mengenai hak ayah sebagai wali nikah untuk anak perempuan yang lahir dari pernikahan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, penting untuk merujuk pada rukun dan syarat nikah yang berlaku.

Dalam kasus pernikahan sirri, perlu dilakukan verifikasi dengan orang tua mengenai keabsahan pernikahan mereka, untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Hal ini penting agar status anak dan hak-hak yang terkait, termasuk hak ayah sebagai wali nikah, dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman yang jelas mengenai rukun dan syarat nikah sangat diperlukan dalam menentukan status dan hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dengan demikian buku nikah orang tua tidak mutlak digunakan KUA dalam penentuan wali nikah.

Dalam konteks pernikahan anak perempuan pertama, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki kewenangan untuk melaksanakan pernikahan anak tersebut tanpa memerlukan orang tua untuk melakukan isbat nikah terlebih dahulu. Terkait dengan kehilangan buku nikah, KUA menyediakan layanan untuk penerbitan duplikat buku nikah, meskipun tidak ada kewajiban untuk mengajukan permohonan duplikat buku nikah untuk syarat pendaftaran nikah anak perempuan pertama tersebut, maka pengakuan langsung dapat diterima sebagai penentu wali nikah. Penentuan wali nikah dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian (ihtiyat) untuk memastikan keabsahan dan legitimasi pernikahan. Selain itu, ketentuan mengenai pelayanan duplikat buku nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024, yang memberikan landasan hukum bagi KUA dalam melaksanakan tugas tersebut.⁵⁴

g. Penghulu KUA Banjarbaru Selatan

Nama : Muhammad Anwar, SHI
Tempat Tanggal Lahir : Kabupaten Kotabaru, 7 Desember
1980
Jabatan : Penghulu KUA

⁵⁴ Masran Musjiono, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Banjarbaru Selatan, Wawancara Pribadi, 5 Maret 2025.

Alamat : Jl. Pendidikan, Gang Selamat Kel
Sekumpul, Kota Martapura

Menurut hasil wawancara dengan Penghulu KUA Banjarbaru Selatan, Dalam hal persyaratan pernikahan anak perempuan, beliau menjelaskan bahwa kewajiban untuk melampirkan buku nikah orang tua merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak diatur dalam hukum nasional. Beliau sependapat dengan kepala KUA mengenai sejarah penentuan jangka kelahiran anak yang berlangsung selama enam bulan. Selain itu, beliau menambahkan bahwa proses pembentukan manusia dimulai dari pembuahan, yang kemudian berkembang menjadi segumpal darah, dilanjutkan menjadi segumpal daging, akhirnya menjadi janin, dan ditiupkan ruh. Proses ini menjelaskan latar belakang penetapan jangka waktu enam bulan untuk kelahiran anak.

Dalam konteks pernikahan sirri dan kehilangan buku nikah, proses verifikasi dapat dilakukan melalui pernyataan orang tua, mengingat bahwa peraturan mengenai buku nikah bertujuan untuk memudahkan Kantor Urusan Agama (KUA)

dalam menentukan wali nikah berdasarkan pengukuran jarak kelahiran anak. Oleh karena itu, dalam situasi di mana pernikahan dilakukan secara sirri atau buku nikah hilang, alternatif yang dapat digunakan adalah dengan mengandalkan pernyataan langsung dari orang tua sebagai bukti sah.

Penggunaan buku nikah sebagai penentu wali nikah anak bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan yang mungkin timbul jika KUA langsung menanyakan kepada pihak yang bersangkutan, yang dapat menyebabkan perasaan tersinggung atau marah akibat anggapan bahwa KUA meragukan status anak tersebut sebagai anak mereka. Dalam kasus pernikahan sirri, maka diperlukan pernyataan dari orang tua digunakan sebagai langkah kehati-hatian dalam menentukan wali nikah, sehingga tetap menghormati privasi dan perasaan pihak terkait.⁵⁵

h. Kepala KUA Cempaka

Nama : Drs. H. Amrullah, M.M
 Tempat Tanggal Lahir : HS Utara, 2 Oktober 1966
 Jabatan : Kepala KUA
 Alamat : Jl. Sekumpul Gang Muhaimin No.
 34 RT 03 RW 02 Kel. Sekumpul
 Kec. Martapura Kab. Banjar

⁵⁵ Muhammad Anwar, SHI, Penghulu Kantor Urusan Agama Banjarbaru Selatan, Wawancara Pribadi, 5 Maret 2025.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala KUA Cempaka, Beliau menjelaskan bahwa untuk anak perempuan pertama yang ingin mendaftar nikah, diwajibkan untuk mengumpulkan buku nikah orang tuanya. Selanjutnya, Kantor Urusan Agama (KUA) akan memeriksa keaslian buku nikah tersebut untuk memastikan bahwa buku nikah yang diserahkan adalah resmi. Dalam proses ini, KUA juga akan memeriksa kesesuaian waktu pernikahan yang tercantum dalam buku nikah, serta meneliti apakah pernikahan terjadi sebelum atau setelah kehamilan, sebagian besar pernikahan sirri terjadi akibat ketidakmampuan untuk memenuhi syarat-syarat pernikahan yang ditetapkan, sehingga pasangan memilih untuk melaksanakan pernikahan secara sirri sebagai alternatif.

Beliau juga menjelaskan bahwa jika yang mendaftar untuk menikah adalah anak pertama, maka diwajibkan untuk mengumpulkan buku nikah orang tuanya guna memverifikasi kesesuaian antara pernikahan orang tua dan kelahiran anak tersebut. Apabila teridentifikasi bahwa anak lahir terhitung lima bulan setelah tanggal pernikahan, hal ini dapat mengindikasikan bahwa anak tersebut kemungkinan lahir akibat kehamilan di luar nikah. Dalam kasus di mana anak perempuan berasal dari orang tua yang menikah secara sirri, orang tua akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi mengenai kelahiran anak tersebut.

Terdapat kebiasaan bahwa beberapa orang tua mengklaim bahwa anak tersebut memang dikandung sebelum pernikahan.

Dalam konteks pernikahan sirri, beliau mengatakan saat ini, apabila seseorang ingin membuat kartu keluarga diwajibkan untuk melalui proses isbat oleh Capil, kemudian anak tersebut akan dicatat sebagai anak dari kedua pasangan, berbeda dengan praktik sebelumnya yang hanya mencantumkan nama ibu.

Dalam hal kehilangan buku nikah, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan surat kehilangan kepada kepolisian. Setelah memperoleh surat kehilangan tersebut, pemohon dapat mengajukannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat pernikahan dilaksanakan untuk meminta penerbitan duplikat buku nikah. Selanjutnya, KUA akan melakukan verifikasi dengan memeriksa data berada di KUA tersebut untuk memastikan keabsahan permohonan duplikat buku nikah.

Anak perempuan yang orang tuanya menikah secara sirri dipanggil ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan keterangan, mengingat banyaknya kasus di KUA Cempaka di mana orang tua mengakui bahwa anak tersebut adalah hasil kehamilan sebelum pernikahan. Beliau menjelaskan bahwa dasar hukum untuk melakukan verifikasi ini adalah karena dalam kartu keluarga tidak tercatat hubungan keluarga antara

orang tua dan anak. Selain itu, beliau menyatakan bahwa KUA tidak mewajibkan orang tua untuk melakukan isbat nikah terlebih dahulu, mengingat mayoritas masyarakat cenderung menolak prosedur tersebut dan lebih memilih agar anak mereka dinikahkan terlebih dahulu.

Untuk perkara duplikat buku nikah itu dikarenakan orang tua tersebut memang dari awal punya buku nikah, maka KUA meminta pembuatan duplikat buku nikah terdahulu dengan tujuan untuk memudahkan penetapan wali bagi anak tersebut. Prosedur ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024.⁵⁶

i. Penghulu KUA Cempaka

Nama : Muhammad Hasnan, S.Ag
Tempat Tanggal Lahir : Banjarbaru, 8 April 1975
Jabatan : Penghulu KUA
Alamat : Komp. PPI A 32 RT 012 RW 003
Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru
Utara

Menurut hasil wawancara dengan Penghulu KUA Cempaka, Beliau menjelaskan beberapa kasus yang terjadi KUA Cempaka adalah ketika anak perempuan pertama yang orang

⁵⁶ Drs. H. Amrullah, M.M, Kepala Kantor Urusan Agama Cempaka, Wawancara Pribadi, 3 Maret 2025.

tuanya menikah sirri, dalam hal kehilangan buku nikah hal tersebut jarang terjadi.

Maka dalam hal nikah sirri KUA akan menentukan kebenaran pernikahan orang tuanya dengan pernyataan tidak usah dengan isbat nikah, apabila memang tidak ada bukti fisik seperti tercatat dalam kartu keluarga dan akta kelahiran anak.

Anak perempuan dari orang tua yang menikah sirri dapat mendaftarkan nikah hanya dengan kesaksian orang tua karena KUA mempertimbangkan aspek keagamaan dan sosial. Dalam banyak kasus, orang tua mungkin tidak memiliki buku nikah resmi, tetapi kesaksian mereka dianggap cukup untuk membuktikan status pernikahan dan kelahiran anak. Hal ini juga didasarkan pada pemahaman bahwa pernikahan sirri, meskipun tidak tercatat secara resmi, tetap sah menurut agama. KUA sering kali memberikan kemudahan bagi anak perempuan dalam proses pendaftaran nikah, terutama jika mereka berasal dari latar belakang yang tidak memiliki akses ke dokumen resmi.

Anak perempuan pertama yang orang tuanya kehilangan buku nikah diwajibkan untuk membuat duplikat buku nikah saat ingin mendaftarkan nikah karena beberapa alasan. Pertama, duplikat buku nikah diperlukan untuk memastikan keabsahan status pernikahan orang tua, yang menjadi dasar hukum bagi status anak dan menghindari keraguan mengenai keabsahan

pernikahan serta hubungan keluarga. Kedua, buku nikah berfungsi sebagai dokumen yang membuktikan hubungan antara orang tua dan anak, yang penting dalam penetapan wali nikah yang sah. Ketiga, pembuatan duplikat buku nikah merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) dan peraturan terkait lainnya. Keempat, memiliki duplikat buku nikah dapat mencegah potensi masalah hukum di masa depan terkait status pernikahan dan hak-hak keluarga, termasuk hak waris. Kelima, duplikat buku nikah memungkinkan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan verifikasi data yang lebih akurat, sehingga proses pendaftaran nikah dapat berjalan dengan lancar.⁵⁷

Untuk meningkatkan pemahaman mengenai hasil wawancara dengan para informan, penulis menyajikan ringkasan hasil wawancara dalam format matriks penelitian berikut:

⁵⁷ Muhammad Hasnan, S.Ag, Penghulu Kantor Urusan Agama Cempaka, Wawancara Pribadi, 3 Maret 2025.

Tabel 1 Matriks Hasil Penelitian

No.	Informan	Praktik	Alasan dan Dasar Hukum
1.	Kepala KUA Liang Anggang	Anak perempuan pertama yang mendaftar nikah melampirkan buku nikah orang tua; jika orang tuanya menikah sirri atau kehilangan buku nikah, maka pernyataan langsung dari orang tua yang bersangkutan dapat digunakan.	Alasan penggunaan buku nikah orang tua yaitu, untuk mempermudah penentuan wali nikah dengan mempertimbangkan jarak kelahiran anak. Jika orang tua menikah secara sirri, pengakuan digunakan karena pelaksanaan isbat nikah dan duplikat buku nikah memerlukan biaya dan waktu, yang seringkali membuat masyarakat enggan melakukannya. Dasar hukum yang digunakan adalah ihtiyat (kehati-hatian).
2.	Penghulu KUA Liang Anggang	Anak perempuan pertama mengumpulkan buku nikah orang tua. Jika orang tuanya menikah sirri, dapat menggunakan surat nikah penghulu tidak resmi atau melihat KK terbaru yang mencantumkan tanggal pernikahan. Jika kedua opsi tersebut tidak memungkinkan, maka pengakuan dapat digunakan. Jika buku nikah hilang, orang tua harus membuat duplikat dengan mengajukan laporan kehilangan ke kepolisian dan menyerahkannya kepada KUA untuk melaksanakan pernikahan.	Alasan penggunaan buku nikah orang tua mempermudah KUA dalam menentukan wali nikah. Jika orang tua menikah sirri, pengakuan digunakan untuk menghindari kesalahan dalam penunjukan wali. Pembuatan duplikat buku nikah berdasarkan pada PMA No 30 Tahun 2024.
3.	Kepala KUA Landasan Ulin	Anak perempuan pertama yang mendaftar nikah melampirkan buku nikah orang tua. Jika orang tuanya menikah sirri, akan diteliti kesesuaian rukun dan syarat pernikahan melalui pengakuan langsung. Jika buku nikah hilang,	Alasan penggunaan buku nikah orang tua bagi anak perempuan pertama memudahkan KUA dalam menentukan wali nikah, meskipun tidak diatur dalam peraturan dan undang-undang. Jika orang tua menikah sirri, pengakuan dapat digunakan. Dasar

		duplikat dapat digunakan; jika tidak memungkinkan, pengakuan akan diterima.	hukum yang beliau gunakan yaitu, duplikat buku nikah diatur dalam PMA No 30 Tahun 2024, dan jika pembuatan duplikat sulit karena jarak atau waktu, pengakuan tetap diterima berdasarkan kehati-hatian dalam penentuan wali nikah.
4.	Penghulu KUA Landasan Ulin	Meskipun tidak ada peraturan yang mengatur pengumpulan buku nikah orang tua oleh anak perempuan pertama, KUA memintanya untuk mempermudah penentuan wali nikah. Jika orang tua menikah sirri, wawancara langsung dilakukan untuk mendapatkan informasi pernikahan, serta pengecekan akta lahir dan kartu keluarga. Jika buku nikah hilang, disarankan untuk segera mengurus duplikat ke KUA tempat pernikahan sebelumnya.	Alasan pengumpulan buku nikah bagi anak perempuan pertama dilakukan karena adanya anggapan di masyarakat bahwa pernikahan orang tua mungkin tidak memenuhi rukun dan syarat. Oleh karena itu, buku nikah dimasukkan sebagai syarat di KUA. Untuk pernikahan sirri, tanpa regulasi hukum yang mengatur buku nikah, cukup dilakukan wawancara dan verifikasi data pendukung seperti akta lahir dan kartu keluarga, berdasarkan fikih munakahat. Pembuatan duplikat buku nikah bagi orang tua yang kehilangan diatur dalam PMA No 30 Tahun 2024.
5.	Kepala KUA Banjarbaru Utara	Di KUA Banjarbaru Utara, persyaratan nikah mencantumkan buku nikah orang tua bagi anak perempuan pertama. Jika buku nikah tidak dapat dikumpulkan karena pernikahan sirri atau kehilangan, KUA akan memeriksa kesesuaian rukun dan syarat pernikahan orang tua, akan tetapi hal tersebut belum pernah terjadi di wilayah KUA Banjarbaru Utara. Untuk kehilangan buku nikah, duplikat dapat dibuat.	Buku nikah orang tua membantu meneliti jarak kelahiran anak dan pelaksanaan nikah. Untuk pernikahan sirri dan kehilangan buku nikah, penegasan hanya berdasarkan rukun dan syarat perkawinan. Di KUA Banjarbaru Utara, dengan masyarakat yang berpendidikan cukup memahami pentingnya pernikahan yang resmi di KUA. Pembuatan duplikat buku nikah dilayani sesuai regulasi dalam PMA No 30 Tahun 2024.

6.	Kepala KUA Banjarbaru Selatan	Dalam penentuan wali nikah anak perempuan, penting untuk memastikan kesesuaian pernikahan dengan rukun dan syarat. Jika pernikahan sirri, KUA melakukan verifikasi langsung dengan orang tua untuk memastikan pemenuhan rukun dan syarat. Hal yang sama berlaku untuk kasus kehilangan buku nikah, di mana verifikasi langsung juga dilakukan dengan orang tua.	Penentuan wali nikah di KUA Banjarbaru Selatan berfokus pada rukun dan syarat pernikahan, bisa menggunakan buku nikah orang tua atau verifikasi langsung dengan orang tua, dengan alasan keduanya sah-sah saja dalam menentukan wali nikah. Dalam kasus kehilangan buku nikah, tidak perlu membuat duplikat terlebih dahulu; cukup dengan pengakuan, berdasarkan kehati-hatian (ihtiyat). Namun, pembuatan duplikat buku nikah tetap dimungkinkan sesuai PMA No 30 Tahun 2024.
7.	Penghulu KUA Banjarbaru Selatan	KUA meminta anak perempuan pertama untuk melampirkan buku nikah orang tua, namun jika orang tua menikah sirri atau kehilangan buku nikah, pernyataan langsung dari orang tua mengenai kebenaran pernikahan dapat digunakan.	Alasan penggunaan buku nikah untuk anak perempuan pertama adalah menghindari ketidaknyamanan, seperti potensi kemarahan orang tua jika hanya menggunakan pernyataan. Pengakuan langsung diperlukan dalam kasus nikah sirri atau kehilangan buku nikah sebagai dasar kehati-hatian (ihtiyat) KUA dalam menentukan wali nikah.
8.	Kepala KUA Cempaka	Anak perempuan yang mendaftar nikah wajib mengumpulkan buku nikah orang tuanya; jika orang tua menikah sirri, digunakan pengakuan langsung, dan jika buku nikah hilang, diperlukan duplikat buku nikah.	Alasan pengumpulan buku nikah di KUA Cempaka diperlukan untuk verifikasi tanggal kelahiran dan waktu nikah orang tua. Jika menikah sirri, digunakan pengakuan orang tua, mengingat banyak yang mengaku anak dikandung sebelum pernikahan. Jika buku nikah hilang, pasangan harus membuat duplikat berdasarkan PMA No 30 Tahun 2024, karena mereka memiliki buku nikah sejak awal.

9.	Penghulu KUA Cempaka	KUA Cempaka menerapkan pengumpulan buku nikah orang tua bagi anak perempuan pertama; jika orang tua menikah sirri, digunakan pengakuan, dan bagi yang kehilangan buku nikah, membuat duplikat terlebih dahulu.	Alasan penggunaan buku nikah orang tua bagi anak perempuan pertama mempermudah penentuan wali nikah. Jika orang tua menikah sirri, cukup menggunakan pengakuan, karena pernikahan tersebut sah secara agama meski tidak tercatat. Jika buku nikah hilang, harus membuat duplikat terlebih dahulu untuk memudahkan KUA dalam memverifikasi hubungan orang tua dan anak, berdasarkan PMA No 30 Tahun 2024.
----	----------------------	--	--

B. Analisis Data

1. Analisis Terhadap Praktik Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Pertama Oleh KUA Kota Banjarbaru Dengan Penggunaan Buku Nikah Orang Tua

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada 5 Kepala dan 4 Penghulu Kantor Urusan Agama di Kota Banjarbaru yaitu, Kepala dan Penghulu Liang Anggang, Kepala dan Penghulu Landasan Ulin, Kepala Banjarbaru Utara, Kepala dan Penghulu Banjarbaru Selatan, dan Kepala dan Penghulu Cempaka tidak ditemukan perbedaan mengenai penggunaan buku nikah sebagai penentu wali nikah bagi anak perempuan pertama. Kelima Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan empat penghulu menyatakan bahwa penggunaan buku nikah orang tua sebagai syarat bagi anak perempuan pertama dalam proses pendaftaran nikah merupakan kebijakan yang diambil oleh KUA. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah penentuan wali nikah, di mana buku nikah berfungsi sebagai acuan untuk mengukur jarak antara kelahiran anak dan waktu pernikahan orang tua.

Sebagaimana diketahui wali nikah termasuk kedalam rukun dan syarat pernikahan, sebagai mana rukun pernikahan ada 5, yaitu:

- a. Suami
- b. Istri
- c. Wali
- d. 2 orang saksi

e. Ijab⁵⁸

Kantor Urusan Agama (KUA) menggunakan buku nikah orang tua sebagai syarat administrasi dalam pendaftaran nikah anak perempuan pertama, meskipun tidak ada peraturan yang secara eksplisit mengaturnya, karena buku nikah berfungsi sebagai bukti resmi yang memvalidasi status pernikahan orang tua dan hubungan keluarga. Dengan mengandalkan buku nikah, KUA dapat memastikan bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum, yang sangat penting untuk menetapkan wali nikah dan melindungi hak-hak anak. Selain itu, penggunaan buku nikah membantu mengurangi ketidakpastian dan potensi sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

Penentuan wali nikah adalah aspek krusial dalam proses pernikahan, terutama dalam konteks hukum Islam. Dengan menggunakan buku nikah sebagai acuan, KUA dapat lebih mudah menentukan wali nikah yang sah, yang biasanya adalah ayah atau wali dari pihak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa KUA berupaya untuk menjaga kepatuhan terhadap norma-norma agama dan hukum yang berlaku.

Walaupun KUA menggunakan buku nikah orang tua sebagai persyaratan dalam proses pendaftaran nikah anak perempuan pertama, wawancara yang dilakukan di KUA Liang Anggang dengan kepala KUA yang melaksanakan akad nikah anak perempuan pertama yang

⁵⁸ Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad- Damyathi, *I'anatut Thalibin Juz 3*, t.t., 501.

orang tuanya kawin hamil dengan menggunakan wali hakim menunjukkan bahwa jika terjadi ketidaksesuaian antara tanggal lahir anak dan tanggal nikah orang tua yang tercantum dalam buku nikah, pengakuan dari orang tua tetap dipakai sebagai alternatif untuk menetapkan wali nikah.

Sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 mengenai kawin hamil:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Berdasarkan pasal tersebut, negara memperbolehkan wanita hamil di luar nikah untuk dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak. Pasal ini memberi legalitas administratif pada perkawinan tersebut agar dapat dicatat secara resmi, dengan tujuan melindungi perempuan dan anak yang dikandungnya dari stigma sosial dan problem hukum.

Namun dalam fikih klasik, terutama dalam mazhab Syafi'iyah yang menjadi rujukan utama di Indonesia, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah (zina) tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Artinya, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya, meskipun kemudian menikah. Implikasinya, laki-laki tersebut tidak sah menjadi wali nikah anak perempuan itu karena tidak memiliki hubungan nasab secara syar'i.

Hal ini diperkuat oleh KHI Pasal 23 yang menyatakan bahwa wali hakim hanya dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, enggan (adlal), atau tidak dapat menghadirkan dirinya. Maka dalam konteks anak perempuan pertama yang lahir dari pernikahan sirri atau hubungan di luar nikah, pengumpulan buku nikah orang tua menjadi penting sebagai bentuk verifikasi, terutama untuk mencocokkan usia anak dengan waktu pernikahan orang tua. Jika ditemukan ketidaksesuaian misalnya anak lahir sebelum pernikahan tercatat maka pengakuan orang tua tidak cukup untuk menetapkan ayah sebagai wali, dan peran wali hakim menjadi solusi yang sesuai secara syar'i dan administratif.

Dengan demikian, praktik permintaan buku nikah oleh KUA bukan semata-mata sebagai syarat administratif tambahan, tetapi merupakan bentuk kehati-hatian dalam menentukan keabsahan wali nikah, sekaligus untuk menyelaraskan antara prinsip fikih dan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kemudian dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa anak perempuan yang lahir dari pernikahan sirri dengan ayah sebagai wali nikah mencerminkan fleksibilitas KUA dalam menentukan wali nikah. Hal ini didasarkan pada pemenuhan rukun dan syarat pernikahan oleh orang tua, meskipun pernikahan tersebut dilakukan secara sirri. Dengan demikian, anak yang lahir dari

pernikahan ini dapat diterima sebagai sah, karena bukan hasil dari hubungan di luar nikah.

2. Analisis Terhadap Praktik Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Pertama Oleh KUA Kota Banjarbaru Tanpa Buku Nikah Orang Tua Dikarenakan Nikah Sirri dan Kehilangan Buku Nikah

a. Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Pertama Dikarenakan Orang Tua Nikah Sirri Menggunakan Pengakuan

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada 5 Kepala dan 4 Penghulu Kantor Urusan Agama di Kota Banjarbaru yaitu, Kepala dan Penghulu Liang Anggang, Kepala dan Penghulu Landasan Ulin, Kepala Banjarbaru Utara, Kepala dan Penghulu Banjarbaru Selatan, dan Kepala dan Penghulu Cempaka menunjukkan bahwa kelima Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan empat penghulu KUA sepakat untuk menggunakan pengakuan orang tua sebagai penentu wali nikah bagi anak perempuan pertama yang orang tuanya menikah sirri.

Namun, Penghulu KUA Liang Anggang dan Penghulu KUA Landasan Ulin menyatakan penentuan wali nikah dapat dilakukan dengan beberapa cara tambahan, keduanya menjelaskan ada beberapa cara, apabila orang tua anak perempuan pertama menikah sirri. Apabila orang tua memiliki surat nikah dari penghulu tidak resmi yang mencantumkan tanggal pernikahan, surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti sah, menunjukkan

bahwa KUA menerima praktik pernikahan tersebut walaupun tidak dilaksanakan secara resmi di KUA akan tetapi pernikahan tersebut tetap sah secara agama.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2:

Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal tersebut menunjukkan Meskipun pernikahan sirri memiliki status hukum yang kompleks, pernikahan tersebut tetap sah menurut agama, dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap berhak untuk diakui dan dilindungi hak-haknya, sehingga anak yang dilahirkan juga adalah anak sah. KUA dapat menerima pendaftaran pernikahan anak perempuan dari orang tua yang menikah sirri, asalkan ada bukti yang cukup mengenai pernikahan tersebut dan ayah bersedia menjadi wali nikah.

Kemudian apabila surat nikah tidak ada, pernyataan langsung dari orang tua akan dijadikan dasar untuk menentukan wali nikah, hal tersebut menekankan pentingnya kejujuran dan pengakuan orang tua dalam proses penetapan wali. Selanjutnya, kartu keluarga terbaru yang mencantumkan tanggal pernikahan orang tua juga dapat digunakan sebagai sumber informasi, memudahkan KUA dalam menentukan jarak kelahiran anak dan penetapan wali nikah. Dengan adanya informasi tentang tanggal

pernikahan dalam kartu keluarga, proses penentuan wali nikah menjadi lebih mudah dan jelas.

b. Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Pertama Dikarenakan Orang Tua Kehilangan Buku Nikah

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada 5 Kepala dan 4 Penghulu Kantor Urusan Agama di Kota Banjarbaru yaitu, Kepala dan Penghulu Liang Anggang, Kepala dan Penghulu Landasan Ulin, Kepala Banjarbaru Utara, Kepala dan Penghulu Banjarbaru Selatan, dan Kepala dan Penghulu Cempaka ditemukan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan praktik penentuan wali nikah anak perempuan pertama yang orang tuanya kehilangan buku nikah. Tiga pendapat yang berbeda tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1) Menentukan Wali Nikah Anak Perempuan Pertama Dikarenakan Orang Tuanya Kehilangan Buku Nikah Dengan Cara Pengakuan

KUA yang menerapkan praktik penentuan wali nikah menggunakan cara pengakuan yaitu Kepala KUA Liang Anggang, Kepala dan Penghulu KUA Banjarbaru Selatan. Kepala KUA Liang Anggang menentukan wali nikah bagi anak perempuan pertama menggunakan pengakuan orang tua sebagai penentu wali nikah bagi calon pengantin anak perempuan pertama dikarenakan kehilangan buku nikah,

dengan beberapa alasan. Pengakuan orang tua penting untuk mengetahui status anak, terutama dalam menentukan apakah anak tersebut lahir dalam atau di luar pernikahan, yang berfungsi untuk mengetahui apakah ayah bisa menjadi wali nikahnya.

Dalam situasi di mana buku nikah orang tua hilang, pengakuan orang tua memberikan kemudahan untuk melanjutkan proses pendaftaran nikah, sehingga tidak menghambat hak anak untuk menikah. Maka dapat dilihat kepala KUA Liang Anggang tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dan jika tidak ada rukun atau syarat pernikahan yang dilanggar, mereka dapat melanjutkan proses pendaftaran nikah meskipun buku nikah orang tua hilang. Dalam kasus di mana jarak antara pelaksanaan nikah orang tua dan kelahiran anak kurang dari enam bulan, penggunaan wali hakim sebagai alternatif menunjukkan kehati-hatian beliau dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan status pernikahan dan hak anak. Kepala KUA Liang Anggang berupaya melindungi hak anak-anak dari pernikahan sirri.

Kepala dan Penghulu KUA Banjarbaru Selatan berpendapat sama di mana buku nikah orang tua tidak ada, seperti pada kehilangan buku nikah, pengakuan orang tua

memberikan alternatif untuk melanjutkan proses pendaftaran nikah. Ini menunjukkan bahwa KUA berusaha untuk tidak menghambat hak anak untuk menikah dan mengakui situasi yang mungkin dihadapi oleh orang tua. Beliau menekankan perlunya verifikasi dengan orang tua mengenai keabsahan pernikahan mereka. Ini menunjukkan bahwa KUA berkomitmen untuk memastikan bahwa pernikahan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, sehingga pengakuan orang tua menjadi langkah penting dalam proses ini. KUA memiliki kewenangan untuk melaksanakan pernikahan anak perempuan pertama tanpa memerlukan isbat nikah dari orang tua terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa KUA berusaha untuk memberikan kemudahan dalam proses pernikahan, sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Maka dapat disimpulkan bahwa Kepala KUA Liang Anggang dan Kepala serta Penghulu KUA Banjarbaru Selatan menerapkan praktik penentuan wali nikah menggunakan pengakuan orang tua, terutama dalam konteks pernikahan sirri dan situasi di mana buku nikah orang tua hilang. Pengakuan orang tua dianggap penting untuk menentukan status anak, apakah lahir dalam atau di luar

pernikahan, yang berpengaruh pada hak ayah sebagai wali nikah.

Meskipun hal tersebut bertentangan dengan peraturan pencatatan perkawinan yang merupakan tindakan administratif sangat penting dalam hukum positif. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan prinsip qiyas terhadap Surah Al-Baqarah ayat 282, ketidaktercatatan nikah (baik karena sirri atau kehilangan dokumen) berimplikasi terhadap penetapan hukum, termasuk dalam hal kewenangan wali. Akan tetapi KUA tidak menghambat hak anak untuk menikah, dengan memberikan alternatif melalui pengakuan orang tua untuk melanjutkan proses pendaftaran nikah. KUA tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dan memastikan bahwa semua rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Dalam kasus di mana jarak antara pelaksanaan nikah dan kelahiran anak kurang dari enam bulan, penggunaan wali hakim sebagai alternatif menunjukkan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.

2) Menentukan Wali Nikah Anak Perempuan Pertama Dikarenakan Orang Tuanya Kehilangan Buku Nikah Dengan Cara Menduplikat Buku Nikah

KUA yang menerapkan praktik penentuan wali nikah menggunakan cara membuat duplikat buku nikah yaitu,

Penghulu KUA Liang Anggang, Kepala dan Penghulu KUA Cempaka. Penghulu KUA Liang Anggang, Kepala dan Penghulu KUA Cempaka berpandangan sama dengan menggunakan duplikat buku nikah dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan pertama karena duplikat tersebut berfungsi sebagai bukti resmi yang memvalidasi status pernikahan orang tua. Dengan adanya duplikat buku nikah, KUA dapat memastikan bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum, yang sangat penting untuk menentukan wali nikah. Selain itu, permintaan duplikat buku nikah mempermudah proses administrasi dalam penetapan wali nikah, sehingga informasi yang diperlukan dapat diperoleh tanpa harus mengandalkan pengakuan yang menjadi kurang formal.

Penggunaan duplikat buku nikah juga mengurangi ketidakpastian yang mungkin timbul dari pengakuan orang tua, sehingga KUA dapat menghindari potensi konflik atau keraguan mengenai status pernikahan dan hak-hak yang terkait.

Penghulu KUA Cempaka memilih untuk mewajibkan pembuatan duplikat buku nikah bagi anak perempuan pertama yang orang tuanya kehilangan buku nikah saat ingin mendaftar nikah karena beberapa alasan penting. Pertama,

duplikat buku nikah yang diperlukan untuk memastikan keabsahan status pernikahan orang tua, yang menjadi dasar hukum bagi status anak. Hal ini penting untuk menghindari keraguan mengenai keabsahan pernikahan dan hubungan keluarga. Dengan adanya duplikat, KUA dapat memastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan pernikahan orang tua adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, buku nikah berfungsi sebagai dokumen resmi yang membuktikan hubungan antara orang tua dan anak, yang sangat penting dalam penetapan wali nikah yang sah. Tanpa bukti yang jelas, proses penetapan wali nikah dapat menjadi rumit dan berpotensi menimbulkan sengketa. Pembuatan duplikat buku nikah juga merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) dan peraturan terkait lainnya. Dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, beliau berusaha untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku, memberikan legitimasi pada proses yang dilakukan.

Dapat disimpulkan Penghulu KUA Liang Anggang, Kepala dan Penghulu KUA Cempaka menerapkan praktik penetapan wali nikah dengan mewajibkan pembuatan duplikat buku nikah bagi anak perempuan pertama yang

orang tuanya kehilangan buku nikah. Duplikat buku nikah berfungsi sebagai bukti resmi yang memvalidasi status pernikahan orang tua, dan hubungan antara orang tua dan anak, kemudian memastikan bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum, yang sangat penting dalam menentukan wali nikah. Dengan adanya duplikat, maka proses administrasi menjadi lebih mudah.

3) Menentukan Wali Nikah Anak Perempuan Pertama Dikarenakan Orang Tuanya Kehilangan Buku Nikah Dengan Cara Pengakuan dan Duplikat Buku Nikah

KUA yang menerapkan praktik penentuan wali nikah menggunakan cara membuat pengakuan dan duplikat buku nikah yaitu, Kepala dan Penghulu KUA Landasan Ulin, dan Kepala KUA Banjarbaru Utara. Kepala dan Penghulu KUA landasan Ulin berpendapat sama dalam kasus kehilangan buku nikah, yang bersangkutan disarankan agar mengajukan permohonan duplikat buku nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat orang tuanya menikah. Akan tetapi hal tersebut hanya disarankan apabila memungkinkan.

Dengan memiliki duplikat, Kantor Urusan Agama (KUA) dapat memastikan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan pernikahan orang tua adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan, yang sangat penting untuk

melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa wali nikah yang ditunjuk adalah sah secara hukum.

Namun, beliau mengatakan juga bahwa dalam praktiknya, proses pembuatan duplikat buku nikah membuat yang bersangkutan keberatan dikarenakan perlu waktu dan tenaga dalam pembuatannya. Oleh karena itu, penggunaan pengakuan sebagai alternatif menjadi pilihan yang lebih praktis. Dalam situasi di mana waktu menjadi faktor penting, pengakuan orang tua dapat mempercepat proses penetapan wali nikah, sehingga pasangan tersebut dapat segera melanjutkan proses pernikahan.

Kepala KUA Banjarbaru Utara walaupun beliau tidak dapat memastikan praktik penentuan wali nikah anak perempuan pertama yang orang tua kehilangan buku nikah dikarenakan tidak pernah terjadi di wilayah beliau, akan tetapi beliau menyampaikan makna tersirat dalam menentukan wali nikah bisa dengan dua jalan dalam menentukan wali nikah anak perempuan pertama, yaitu jika memungkinkan menggunakan duplikat buku nikah sebagai bukti sah pernikahan orang tua, dan jika tidak memungkinkan, maka menggunakan pengakuan orang tua sebagai alternatif, mengingat di wilayah beliau belum pernah terjadi kasus kehilangan buku nikah yang memerlukan

penanganan khusus. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menjaga keabsahan proses pernikahan, dengan catatan bahwa pernikahan orang tua tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan yang berlaku.

Kesimpulan dari data tersebut menunjukkan bahwa Kepala dan Penghulu KUA Landasan Ulin sepakat bahwa dalam kasus kehilangan buku nikah, langkah pertama yang disarankan adalah mengajukan permohonan duplikat buku nikah ke KUA tempat orang tua menikah, dengan catatan bahwa hal ini hanya dilakukan jika memungkinkan. Memiliki duplikat buku nikah sangat penting untuk memastikan keabsahan dan validitas informasi terkait pernikahan orang tua, yang pada gilirannya melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa wali nikah yang ditunjuk sah secara hukum. Namun, mengingat kendala waktu dan tenaga dalam proses pembuatan duplikat, penggunaan pengakuan orang tua sebagai alternatif menjadi pilihan yang lebih praktis.

Kepala KUA Banjarbaru Utara menekankan bahwa meskipun tidak ada pengalaman langsung dalam menangani kasus kehilangan buku nikah, terdapat makna tersirat bahwa penentuan wali nikah dapat dilakukan melalui dua jalur: menggunakan duplikat buku nikah jika memungkinkan, atau

pengakuan orang tua jika tidak. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menjaga keabsahan proses pernikahan, dengan tetap memperhatikan bahwa pernikahan orang tua telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku.

Praktik yang diterapkan oleh masing-masing KUA tidak sepenuhnya seragam. Beberapa kepala dan penghulu KUA memperbolehkan wali nikah dari ayah meski tidak ada buku nikah, selama terdapat pengakuan orang tua dan dokumen pendukung lain seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Hal ini menunjukkan fleksibilitas pendekatan, namun juga mengandung risiko ketidakkonsistenan kebijakan antar-KUA.

Akan tetapi terdapat kelebihan dalam praktik kehati-hatian tersebut karena sejalan dengan prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan kepada kerusakan) dalam fikih. Akan tetapi, kekurangannya adalah ketidakharmonisan antara norma hukum tertulis dengan pelaksanaannya di lapangan.

3. Analisis Terhadap Alasan Dan Dasar Hukum Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru Mengenai Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Menggunakan Buku Nikah Orang Tua

Penggunaan buku nikah orang tua bagi anak perempuan pertama yang ingin mendaftar untuk proses penetapan wali nikah 5 Kepala dan 4 Penghulu di Kota Banjarbaru, sepakat untuk menggunakan buku nikah orang tua sebagai syarat bagi calon pengantin perempuan yang mendaftar nikah, karena buku nikah berfungsi sebagai bukti resmi yang memvalidasi status pernikahan orang tua dan hubungan keluarga dengan anak, serta membantu memastikan jarak kelahiran anak dengan tanggal pernikahan orang tua.

Dalam praktiknya, permintaan dokumen ini digunakan untuk membuktikan apakah anak perempuan tersebut lahir dalam pernikahan yang sah menurut hukum negara. Jika terdapat keraguan, misalnya anak lahir sebelum pernikahan orang tua, maka KUA dapat menunjuk wali hakim sebagai pengganti.

Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7:

“(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”

Kemudian dijelaskan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 pasal 1 ayat 9 dan 10:

“Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah.”

“Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku.”

Dalam pasal tersebut jelas bahwa buku nikah sangat penting dalam pernikahan, Buku nikah memberikan pengakuan hukum terhadap status pernikahan, yang penting untuk melindungi hak-hak

pasangan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut termasuk dalam penggunaan wali nikah bagi anak dari pernikahan tersebut. Dalam konteks hukum Islam, penetapan wali nikah adalah aspek yang sangat penting, bahkan dalam fikih dijelaskan tidak sah pernikahan tanpa ada wali sebuah riwayat mengatakan:

خبر ابن حبان في صحيحه : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له

“Menurut riwayat Ibnu Hibban dalam Shahihnya: Tidak ada perkawinan kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil, dan perkawinan selain itu tidak sah, jika keduanya berselisih, maka wali hakim adalah wali dari orang yang tidak mempunyai wali.”⁵⁹

Dengan mengandalkan buku nikah orang tua, KUA dapat memastikan bahwa wali yang ditunjuk memiliki hubungan yang sah dengan anak. Ini memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak dalam pernikahan.

Namun dalam praktiknya, seperti yang ditemukan dalam penelitian ini, beberapa Kepala dan Penghulu KUA di Kota Banjarbaru tetap memperbolehkan ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak perempuan pertama, bahkan ketika pernikahan orang tuanya bersifat sirri atau tidak memiliki buku nikah. Dalam kondisi kehilangan dokumen atau tidak tercatat secara resmi, KUA seringkali mengandalkan pengakuan orang tua dan pendekatan administratif, bukan ketentuan fikih murni.

⁵⁹ Al-Syeikh Ibrahim Al-Bayjuri, *Hasyiyah As Syeikh Ibrahim Al Bayjuri Jilid 2*, t.t., 189.

Meskipun begitu, dalam praktiknya, Kepala dan Penghulu KUA di beberapa wilayah tidak secara ketat menggunakan rujukan fikih klasik dalam menetapkan wali. Alasannya adalah karena pendekatan fikih klasik dinilai tidak selalu dapat menjawab kompleksitas sosial di lapangan. Banyak masyarakat yang tidak memiliki dokumen sah, tidak mampu melakukan isbat nikah, atau bahkan tidak paham pentingnya pencatatan. Oleh karena itu, Kepala KUA cenderung mengedepankan pendekatan maslahat (kemanfaatan), pelayanan publik, dan fleksibilitas administratif, daripada menerapkan ketentuan fiqh secara kaku.

Kepala dan Penghulu KUA juga menyadari bahwa masyarakat membutuhkan solusi cepat dan mudah dalam mengurus pernikahan anak mereka. Sehingga, meskipun secara fikih klasik wali nasab tidak sah, mereka tetap menerima pengakuan orang tua sebagai dasar penetapan wali, selama tidak ada keberatan atau unsur yang secara terang melanggar hukum.

Praktik ini mencerminkan adanya upaya harmonisasi antara hukum Islam (fiqh), hukum positif (KHI dan PMA), serta kebutuhan sosial masyarakat, meskipun hal ini menyisakan ruang untuk kritik dan perlunya pedoman teknis nasional agar tidak terjadi kesenjangan penafsiran antar-KUA.

4. Analisis Terhadap Alasan Dan Dasar Hukum Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru Mengenai Penentuan Wali Nikah Anak Perempuan Tanpa Buku Nikah Orang Tua Dikarenakan Nikah Sirri dan Kehilangan Buku Nikah

a. Menentukan Wali Nikah Anak Perempuan Pertama Yang Orang Tuanya Menikah Sirri Dengan Cara Pengakuan

Penggunaan pengakuan bagi anak perempuan pertama yang orang tuanya menikah sirri dalam proses penetapan wali nikah mencerminkan pendekatan yang pragmatis dan responsif terhadap situasi sosial yang kompleks. Dalam konteks pernikahan sirri 5 Kepala dan 4 Penghulu KUA se Kota Banjarbaru, sepakat di mana dalam pernikahan sirri, pengakuan menjadi alternatif yang penting untuk memastikan bahwa anak perempuan pertama tetap memiliki akses ke hak-haknya dalam proses pernikahan.

Salah satu alasan utama penggunaan pengakuan adalah untuk memberikan solusi yang cepat dan efisien dalam situasi di mana dokumen resmi, seperti buku nikah, tidak ada. Dalam kasus, orang tua yang menikah sirri tidak memiliki buku nikah yang dapat digunakan sebagai bukti sah pernikahan. Dengan menerima pengakuan dari orang tua, KUA dapat mempercepat proses penetapan wali nikah tanpa harus menunggu proses administratif yang mungkin rumit dan memakan waktu. Ini sangat penting untuk

memastikan bahwa anak perempuan dapat melanjutkan proses pernikahan tanpa terhambat.

Penggunaan pengakuan juga mencerminkan pemahaman KUA terhadap realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Banyak orang tua mungkin enggan atau tidak mampu untuk menjalani proses formal seperti isbat nikah di Pengadilan Agama, terutama karena masalah biaya dan waktu.

b. Menentukan Wali Nikah Anak Perempuan Pertama Yang Orang Tuanya Kehilangan Buku Nikah Dengan Cara Pengakuan

Kepala KUA Liang Anggang mengambil jalan pengakuan dalam penentuan wali nikah anak perempuan pertama karena beberapa alasan yang berkaitan dengan realitas sosial, praktis, dan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam. Berdasarkan pengalaman pribadi, beliau menyadari bahwa banyak masyarakat yang protes dan enggan melaksanakan proses formal seperti pembuatan duplikat nikah di KUA pelaksanaan akad nikah dilaksanakan, prosedur yang rumit dan waktu yang diperlukan.

Dalam konteks ini, penggunaan pengakuan orang tua sebagai alternatif menjadi pilihan yang lebih praktis dan efisien. Beliau berupaya untuk mempermudah proses pernikahan bagi calon pengantin perempuan, mengingat bahwa yang ingin menikah adalah anak tersebut, bukan orang tuanya.

Meskipun beliau menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum yang eksplisit untuk penggunaan pengakuan dalam konteks ini, langkah tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian. Dalam fikih, kehati-hatian sangat penting, terutama dalam hal pernikahan yang merupakan ibadah yang dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Swt.

Terkait dengan kehilangan buku nikah, meskipun KUA Banjarbaru Selatan menyediakan layanan untuk penerbitan duplikat buku nikah, Kepala dan Penghulu KUA Banjarbaru Selatan menjelaskan tidak ada kewajiban untuk mengajukan permohonan tersebut sebagai syarat pendaftaran nikah. Ini menunjukkan beliau berusaha untuk tidak membebani masyarakat dengan prosedur administratif yang rumit, terutama ketika situasi kehilangan buku nikah dapat terjadi. Dalam konteks ini, pengakuan orang tua dapat diterima sebagai penentu wali nikah, yang memungkinkan proses pernikahan berlangsung tanpa hambatan yang tidak perlu.

Penggunaan pengakuan juga mencerminkan prinsip kehati-hatian (ihtiyat) yang sangat penting dalam fikih. Dengan menerima pengakuan orang tua, KUA memastikan bahwa wali nikah yang ditunjuk memiliki hubungan langsung dengan anak, sehingga menjaga keabsahan pernikahan.

Penghulu KUA Banjarbaru Selatan juga menjelaskan ketika kehilangan buku nikah, proses verifikasi melalui pernyataan orang

tua dianggap sebagai solusi yang lebih praktis dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Mengingat bahwa peraturan mengenai buku nikah bertujuan untuk memudahkan Kantor Urusan Agama (KUA) saja dan tidak ada aturan resmi yang mengatur seorang anak perempuan pertama harus mengumpulkan buku nikah orang tua dalam menentukan wali nikah, penggunaan pernyataan orang tua sebagai bukti sah menjadi alternatif yang logis ketika buku nikah hilang.

c. Menentukan Wali Nikah Anak Perempuan Pertama Yang Orang Tuanya Kehilangan Buku Nikah Dengan Cara Pembuatan Duplikat Buku Nikah

Penghulu KUA Liang Anggang penggunaan duplikat buku nikah dalam menentukan wali nikah anak perempuan pertama yang orang tuanya kehilangan buku nikah karena beberapa alasan yang berkaitan dengan keabsahan, kelegalan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penggunaan duplikat buku nikah sebagai bukti sah pernikahan orang tua memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam proses penetapan wali nikah. Dalam konteks pernikahan, keabsahan dokumen sangat penting untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa wali nikah yang ditunjuk memiliki legalitas yang diakui secara hukum.

Dan beliau menjelaskan dengan adanya dasar hukum yang jelas mengenai penerbitan duplikat buku nikah, seperti yang diatur

dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024 dalam

Pasal 47:

- (1) Buku Nikah yang rusak atau hilang diterbitkan Buku Nikah Pengganti.
- (2) Buku Nikah Pengganti diterbitkan untuk mengganti Buku Nikah suami atau Buku Nikah istri yang rusak atau hilang.

Dengan menerapkan peraturan tersebut menunjukkan bahwa beliau berupaya untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum. Penggunaan duplikat buku nikah juga berfungsi untuk menghindari potensi konflik atau sengketa di kemudian hari. Duplikat buku nikah dapat membantu mengklarifikasi status pernikahan orang tua dan mengurangi kemungkinan adanya keraguan atau pertentangan mengenai hak-hak yang terkait dengan pernikahan tersebut.

Kepala KUA Cempaka memberikan alasan dalam penggunaan duplikat buku nikah dalam menentukan wali nikah anak perempuan pertama yang orang tuanya kehilangan buku nikah karena memang dari awal buku nikah itu ada akan tetapi hilang maka dengan pembuatan duplikat buku nikah KUA dapat mengonfirmasi keabsahan status pernikahan orang tua.

Dalam konteks pernikahan, kejelasan mengenai wali nikah sangat penting, dan dengan adanya duplikat buku nikah, KUA dapat memastikan bahwa wali yang ditunjuk memiliki hubungan yang sah dan diakui secara hukum dengan anak. Selain itu pembuatan

duplikat buku nikah secara jelas diterangkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024 dalam pasal 47.

- (3) Permohonan Buku Nikah yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai dengan Buku Nikah yang rusak.
- (4) Permohonan Buku Nikah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai dengan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (5) Penerbitan Buku Nikah Pengganti dilakukan oleh KUA tempat dilaksanakan akad nikah.

Penghulu KUA Cempaka memberikan alasan dengan menggunakan duplikat buku nikah, KUA dapat memastikan bahwa semua informasi yang berkaitan dengan pernikahan orang tua adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, yang sangat penting dalam konteks penetapan wali nikah.

Beliau memilih penggunaan duplikat buku nikah dalam menentukan wali nikah anak perempuan pertama yang orang tuanya kehilangan buku nikah karena beberapa alasan penting. Duplikat buku nikah diperlukan untuk memastikan keabsahan status pernikahan orang tua, yang menjadi dasar hukum bagi status anak dan menghindari keraguan mengenai hubungan keluarga. Buku nikah berfungsi sebagai dokumen yang membuktikan hubungan antara orang tua dan anak, sehingga KUA dapat memastikan wali nikah yang ditunjuk memiliki keabsahan yang sah.

Pembuatan duplikat buku nikah juga merupakan syarat administratif yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA),

yang menunjukkan komitmen untuk mematuhi hukum dan menjaga integritas KUA.

Kesimpulan dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa penggunaan duplikat buku nikah dalam menentukan wali nikah anak perempuan pertama yang orang tuanya kehilangan buku nikah adalah langkah yang diambil oleh Penghulu KUA Liang Anggang dan Kepala serta Penghulu KUA Cempaka berdasarkan beberapa pertimbangan penting. Duplikat buku nikah berfungsi sebagai bukti sah yang memastikan keabsahan status pernikahan orang tua, memberikan dasar hukum yang jelas bagi status anak, serta melindungi hak-hak anak dengan menghindari keraguan mengenai hubungan keluarga.

Dengan adanya dasar hukum yang jelas, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2024, langkah ini mencerminkan komitmen untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

- d. Menentukan Wali Nikah Anak Perempuan Pertama Yang Orang Tuanya Kehilangan Buku Nikah Dengan Cara pengakuan dan Pembuatan Duplikat Buku Nikah

Kepala dan Penghulu KUA Landasan Ulin menggunakan dua cara dalam menentukan wali nikah anak perempuan pertama yang orang tuanya kehilangan buku nikah, yaitu melalui pengakuan langsung dan pembuatan duplikat buku nikah, karena beberapa

alasan yang berkaitan kehati-hatian (ihtiyat) dalam proses penetapan wali nikah.

Beliau menggunakan pengakuan langsung sebagai salah satu cara untuk mempermudah pihak yang ingin melangsungkan pernikahan. Dalam beberapa kasus, orang tua mungkin mengalami kesulitan untuk mengumpulkan dokumen resmi seperti buku nikah, terutama jika mereka telah kehilangan buku nikah tersebut. Dengan menerima pengakuan langsung, KUA dapat mempercepat proses penetapan wali nikah tanpa membebani orang tua dengan prosedur administratif yang rumit, seperti pembuatan duplikat buku nikah dahulu. Ini juga menunjukkan pemahaman beliau selaku Kepala KUA terhadap realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat, di mana tidak semua orang memiliki akses mudah untuk memenuhi semua persyaratan administratif.

Di sisi lain, apabila memungkinkan dalam pembuatan duplikat buku nikah maka akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Meskipun tidak ada ketentuan yang mewajibkan calon pengantin perempuan untuk mengumpulkan buku nikah orang tua, langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian untuk memastikan kesesuaian antara kelahiran anak dan pelaksanaan pernikahan orang tua. Dengan adanya duplikat buku nikah, KUA dapat memastikan bahwa wali nikah yang ditunjuk memiliki hubungan yang sah dan

diakui secara hukum dengan anak, serta memberikan dasar hukum yang jelas bagi status anak.

Penghulu KUA Landasan Ulin menambahkan lagi alasan dari disarankannya membuat duplikat buku nikah bagi pihak yang kehilangan karena hal tersebut bukan saja sebagai penentu wali nikah tetapi juga akan dibutuhkan dalam berbagai kepentingan lainnya, seperti pembuatan paspor, pelaksanaan umrah, haji, dan urusan terkait ahli waris.

Dalam hal penentuan wali nikah anak perempuan pertama yang orang tuanya kehilangan buku nikah Kepala KUA Banjarbaru Utara meskipun tidak jelas dalam menjelaskan praktik yang beliau gunakan disebabkan kejadian tersebut tidak pernah terjadi di wilayah beliau akan tetapi beliau menyiratkan dalam hal persyaratan buku nikah orang tua bagi anak perempuan pertama itu tidak ada peraturan yang mengatur, maka selama pernikahan orang tua memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang berlaku menggunakan atau tidak buku nikah maka hal tersebut sah-sah saja. Karena yang penting adalah kejelasan dalam hal kelahiran anak, apakah dikandung sebelum atau sesudah pernikahan orang tuanya, dari hal tersebut dapat disimpulkan apakah yang menjadi wali nikah ayah atau wali hakim.

Perbedaan praktik antar-KUA ini menunjukkan belum adanya standarisasi prosedur dalam penetapan wali nikah bagi anak

perempuan pertama, khususnya dalam kasus pernikahan sirri atau kehilangan buku nikah. Hal ini diakui oleh Kepala KUA Banjarbaru Utara yang menyatakan bahwa tidak ada ketentuan resmi tertulis yang mewajibkan buku nikah orang tua dalam proses tersebut. Oleh karena itu, selama keabsahan nasab dapat dibuktikan dan rukun nikah terpenuhi, maka penetapan wali tetap dapat dilaksanakan dengan sah. Keseluruhan praktik ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pendekatan yang berbeda, semua KUA pada prinsipnya mengedepankan asas kemaslahatan, kejelasan hukum, dan kemudahan layanan kepada masyarakat, namun tetap memerlukan regulasi teknis yang seragam agar tidak menimbulkan ketimpangan administratif antarwilayah.